

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas demokratis dalam menyelenggarakan pemerintahan, dengan memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Seperti dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) yang berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya adalah milik rakyat dan harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat*". Hal ini merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang di wujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran serta pemerintah daerah sangat di harapkan untuk menunjang atau meningkatkan pendapatan yang di pergunakan untuk biaya pembangunan diberbagai bidang, disini pemerintah daerah dituntut untuk menggali, mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintah selakannya

Dengan perubahan tersebut pada akhirnya membawa implikasi pada kemungkinan munculnya kembali variasi antar daerah dalam model-model pemerintahan daerah khususnya di tingkat desa. Dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (1) menyebutkan : “ *Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah*”. Berbagai perubahan bentuk pemerintahan telah dilakukan oleh berbagai desa sesuai dengan asal usul desa di berbagai daerah. Dalam pemerintahan desa banyak terdapat berbagai pengembangan dalam pemenuhan kebutuhan suatu sistem pemerintahan yang dapat meningkatkan pembangunan dalam berbagai sektor. Salah satu pengembangan dari sistem pembangunan tersebut adalah pembuatan Rencana Strategis di tingkat desa yang telah dilakukan oleh Desa Pendowoharjo yang telah menyusun Rencana Strategis untuk tahun 2001-2005.

Di dalam Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, Sasaran, Cara pencapaian tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Untuk itu di dalam merumuskan dan mempersiapkan Rencana Strategi desa harus melakukan beberapa langkah-langkah awal. *Pertama*, menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan kaputusan msndasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan-kegiatan organisasi dalam hal ini desa dalam pencapaian tujuan akhir organisasi. Dalam pemerintahan desa tujuan akhir ini sangat terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*

mengenali lingkungan dimana organisasi dalam hal ini adalah desa mengimplementasikan interaksinya, terutama suasana pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. *Ketiga*, mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama di dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi. Dimana dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menganalisa berbagai sumber-sumber yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam mewujudkan dari perencanaan strategis yang sudah ditentukan. Dimana hal ini juga sangat ditentukan oleh sumber daya yang dipilih dan dimiliki oleh organisasi terkait dalam implementasi Rencana Strategis yang telah dirumuskan. *Keempat*, menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis. Dalam hal ini diperlukan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama dalam mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan rencana strategis yang telah dirumuskan.

Berbagai perencanaan yang telah disusun tersebut merupakan hasil analisa berbagai potensi dari desa yang mampu dikelola sebagai sumber daya pembangunan desa. Dimana hal tersebut setelah dirumuskan akan dilakukan langkah perwujudannya atau pelaksanaannya. Di dalam langkah tersebut selamaini dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) (diatur dalam UU No. 22/1999) melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berbagai program dan kegiatan dari hasil rumusan perencanaan yang telah dirumuskan akan mendapat kontrol langsung dari masyarakat dan pihak-pihak

yang berkepentingan (*Stakeholders*) sehingga akan didapat pertanggungjawaban yang nyata dari pemerintah desa sebagai pelaksana.

Pembangunan di desa merupakan hal yang sangat penting dan akan membawa dampak yang luas pada kehidupan masyarakat pada umumnya, dan warga desa pada khususnya. Dengan adanya perencanaan dalam pembangunan desa berdasarkan analisis internal dan eksternal desa maka pembangunan desa secara struktur dan kultural akan mulai dapat diimplementasikan dengan suatu kontrol dan metode yang terukur.

Pembangunan dilaksanakan secara terencana, sistematis berkelanjutan serta dinamis, disamping adanya partisipasi masyarakat. Saat ini desa telah memiliki kemampuan untuk merumuskan perencanaan pembangunan dalam Rencana Strategis Desa. Dari hal tersebut nampak bahwa dalam pembangunan desa merupakan suatu usaha perubahan yang dilakukan oleh masyarakat desa di mana sangat diperlukan suatu pembangunan yang terencana dan sistematis dengan menggunakan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki sebagai sumber daya desa.

Rencana Strategis digunakan sebagai petunjuk, penentu arah sasaran dan tujuan dari pembangunan, serta dengan bagaimana Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan dengan mengacu pada sumber daya Desa. Analisis sumber-sumber daya yang menjadi potensi bagi desa dirumuskan sebagai modal dasar dalam penentuan langkah-langkah pembangunan guna membentuk arah pembangunan. Jika pembangunan tidak diarahkan maka akan terjadi banyak sekali tumpang tindih baik karena tidak tuntasnya pelaksanaan suatu program

dibidang tertentu tetapi juga akan menghilangkan fokus pembangunan yang seharusnya dilakukan berdasarkan kondisi kebutuhan masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu perencanaan dalam pembangunan yang sistematis dimana mampu memfokuskan pembangunan dan mengalokasikan berbagai sumber daya yang tersedia serta mampu melihat implikasi di masa depan. Hal inilah yang telah disadari oleh Pemerintahan Desa Pendowoharjo maka segera dirumuskan Rencana Strategis Desa Pendowoharjo Tahun 2001-2005.

Pelaksanaan Rencana Strategis tersebut telah dilaksanakan dan dalam beberapa waktu pelaksanaan tersebut banyak mengalami permasalahan. Salah satu permasalahan yang ada adalah masih adanya anggapan masyarakat bahwa suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus berupa pembangunan fisik. Sehingga masyarakat menginginkan Pemerintah Desa untuk melakukan rencana program dibidang pembangunan fisik. Sedangkan bidang lain seperti pendidikan masih kurang mendapat perhatian masyarakat, sehingga Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program dalam bidang tersebut kurang terfokus dan masih membutuhkan perhatian lebih.

Kurang fokusnya Pemerintah Desa Pendowoharjo pada bidang selain pembangunan yang berupa fisik dapat dilihat dalam program kerja yang telah dilaksanakan yang mencatumkan banyak sekali sektor dan sub sektor tentang pembangunan fisik hal tersebut dapat anda lihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Program Pembangunan Tahun 2002

No	Sektor/Sub Sektor	Uraian	Rencana Jadwal
1	Kelembagaan Pemerintah Desa, Kegiatan BPD	a) Pelantikan BPD b) Pemilihan dan Pelantikan Pimpinan BPD c) Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan BPD d) Pemilihan Sekretaris BPD	Januari 2002 Januari-Februari 2002 Pebruari-Maret 2002 Nop-Des 2002
2	Kelembagaan Pemerintahan Desa. Kegiatan Pemerintahan Desa dan Prasarana	a) Pengadaan Saranan dan Prasarana Pemerintah Desa b) Pengisian Lowongan Kabag. Pembangunan, Agama dan Kesra serta Duku Diro c) Perbaikan gedung Olah Raga d) Pembelian Kursi lipat	Triwulan I dan III April-Juni 2002 Triwulan IV Triwulan III
3	Prasarana Perhubungan dan Produksi	a) Jalan lingkungan Karanggede, Sawahan, Pacetan, Bandung dan Bluyahan b) Bangket jalan /slokan Ngentak, Cepit, Kaliputih, Pucung, Karanggede, Ngimbang, Bandung, Barat Pasar Niten dan Bluyahan c) Pengerasan jalan Bangmalang, Bakalan, Kaliputih, Banyon, Bluyahan, Rogoitan dengan cor beton d) Conblok jalan Ngentak, Cepit, Sawahan, Ngimbang. e) Pengaspalan Jalan Karanggondang, Bandung, Cepit f) Pembuatan Jalan Karanggondang, Krandoan, Duku g) Pintu Air Sadap Diro, Cepit dan Kerdu	Semester I dan II Semester I dan II
4	Prasarana Sosial dan lain-lain	a) Pagar Bumi Kaliputih, Pucung b) Drainase Piringan c) Pembuatan Tempat Sampah Piringan d) Balai RW Cepit e) Rehab Pos Kamling Piringan f) Gedung Serba Guna Pendowo Asri g) Balai Makam Ngimbang h) Rehab Ganura Ngimbang	Semester I dan II Semester I Semester II Semester I dan II Semester II Semester I Semester I dan II Semester I

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana Implementasi Rencana Strategis Desa Pendowoharjo Tahun 2001-2005 oleh Pemerintah Desa Pendowoharjo?”

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana efektifitas Rencana Strategis yang telah diimplementasikan dan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dalam implementasi Rencana Strategis Pemerintah Desa Pendowoharjo tahun 2001-2005.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah bagi kajian ilmu pemerintahan terutama tentang pelaksanaan dan upaya-upaya dalam implementasi Rencanan Strategis khususnya Rentsra Desa.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, terutama bagi Pemerintah Desa Pendowoharjo dalam unavanya mengimplementasikan Rencana Strategis Desa

D. KERANGKA DASAR TEORI

Dalam mengadakan penelitian, peneliti perlu memberikan pedoman dalam berpikir dan melakukan penelitian dengan menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam penulisan ini. Yang dimaksud teori adalah :

Serangkaian asumsi, konsep definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumsukan hubungan antar konsep.³

Hal tersebut diatas mengandung 3 hal yang pertama, Teori adalah serangkaian proposisi antar konsep yang berhubungan. Yang kedua, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Dan yang ketiga, teori merupakan cara memahami fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep yang mana berhubungan dengan konsep lain dan bagaimana bentuk hubungan yang terjadi.

1. Perencanaan Strategis

Perencanaan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik dengan cara efektif dan efisien dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.⁴ Perencanaan menyangkut pengalokasian sumber-sumber yang ada dan berguna dalam mencapai tujuan semaksimal mungkin. Suatu perencanaan dapat membuat suatu proses lebih cepat karena tersusun secara sistematis target dari langkah-langkah serta analisa lingkungan yang sangat berguna untuk terwujudnya tujuan dari rumusan perencanaan.

³ Soedjadi, *Metode Penelitian Survei*, LP3, Jakarta, 1989 hal 27

Perencanaan Strategis muncul sebagai paradigma alternatif dalam bidang perencanaan, sebagai penggantian model perencanaan lama, yakni perencanaan jangka panjang (*long-range planning*). Dalam perencanaan ini suatu organisasi akan melakukan pengamatan lingkungan eksternal dan internal dari organisasinya. Karena itu hal ini sangat penting dalam perwujudan dari tujuan organisasi yang akan dicapai.

Seperti yang dikemukakan oleh John M. Bryson :

“Perencanaan strategis adalah sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting untuk membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.”⁵

Untuk mencapai sesuatu yang terbaik perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternative, dan menekankan pada implikasi masa depan dengan keputusan sekarang.

Selain itu manfaat dari Perencanaan Strategis bagi suatu organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja (*performance*) organisasi dengan tujuan akhir adalah untuk memenuhi misi organisasi dan memberi kepuasan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan misi yang akan di capai suatu organisasi. Perencanaan strategis berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengidentifikasi, menilai, dan memecahkan masalah-masalah yang berhubungan di dalam dan diluar organisasi. Untuk itu perencanaan strategis dimaksudkan seperangkat konsep, prosedur dan alat yang digunakan untuk mengatur usaha-usaha yang sering dipergunakan dalam

⁵ John M. Bryson Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, Banteng, Balaia, 1999, Yogyakarta

pembuatan keputusan dan tindakan dalam mengarahkan organisasi untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah.

Dalam suatu perencanaan strategis terdapat berbagai cara untuk merumuskannya, salah satu langkah-langkah yang dirumuskan oleh John M. Bryson, delapan langkah tersebut adalah :⁶

1. Memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis.

Dalam langkah pertama ini yaitu langkah untuk mengadakan negosiasi dan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuatan keputusan (*decision maker*) atau pembentuk opini (*opinion leader*) internal atau mungkin eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan adanya keterlibatan orang-orang yang penting dalam organisasi. Atau dengan kata lain diperlukan beberapa orang atau kelompok orang untuk memulai suatu proses, sehingga dengan adanya sesuatu yang mulai dijalankan maka proses tersebut akan terus berlanjut. Dan kemudian adalah menentukan pihak mana yang akan ikut dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Setelah ditentukan maka diperlukan kesepakatan yang mencakup upaya perencanaan, langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses, bentuk dan jadwal pembuatan laporan, peran dan fungsi serta keanggotaan suatu kelompok atau komite yang berwenang mengawasi upaya tersebut. Peran, fungsi dan keanggotaan tim perencanaan strategis dan komitmen sumber daya yang dibutuhkan lebih lanjut.

2. Memperjelas mandat organisasi

Dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan jelas bagaimana orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut untuk melakukan hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang oleh perusahaan. Mandat formal dan informal ini merupakan hal yang harus dihadapi oleh organisasi.

3. Memperjelas Misi dan Nilai-nilai Organisasi

Dalam menetapkan misi organisasi harus mengadakan konsensus dasar bersama *stakeholder*, karena kunci dari keberhasilan dalam organisasi public dan nirlaba adalah kepuasan "stakeholder". Hal ini terkait dengan bagaimana *stakeholder* mempengaruhi keberadaan organisasi dan pengaruh keberadaan organisasi sendiri terhadap *stakeholder*.

4. Menilai Lingkungan Eksternal

Dalam merumuskan perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi. Peluang dan ancaman dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi.

5. Menilai Lingkungan Internal

Dalam menilai lingkungan internal akan didapat kekuatan dan kelemahan internal, hal ini dapat dipantau dari sumber daya (*inputs*), strategi sekarang (*process*), dan kinerja (*output*), dengan demikian akan mudah dalam mengevaluasi keefektifan relative strategi alternatif, alokasi sumber daya,

6. Mengidentifikasi Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi

Dalam perencanaan strategi akan melahirkan “percampuran” antara organisasi dengan lingkungannya. Mandat dan lingkungan eksternal sebagai perencanaan dari luar ke dalam sedangkan misi dan nilai-nilai internal sebagai perencanaan dari dalam ke luar. Isu-isu strategis yang muncul akan dapat dihadapi dengan cara terbaik dan efektif dengan menggunakan perencanaan strategis yang telah dirumuskan.

7. Merumuskan Startegi untuk Mengelola Isu-isu

Pengembangan strategi dilakukan dengan indentifikasi elternatif praktis, dan impian atau visi untuk memecahkan isu strategis, mengembangkan strategi merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya merinci hambatan mencapai alternatif, impian atau visi tersebut, hal dilakukan karena strategi yang akan dikembangkan akan menghadapi kesulitan implementasi secara langsung dan tidak serampangan.

8. Menciptakan Visi Organisasi yang Efektif untuk Masa Depan.

Organiasi mengembangkan diskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Untuk itu dirumsukan sebuah Visi, Visi keberhasilan harus singkat dan dapat memberi ilham.

Dalam Rencana Strategis organisasi terdapat analisis informasi tentang kekuatan dan kelemahan *internal* organisasi sehubungan dengan peluang dan ancaman *eksternal*, yang merupakan langkah yang sangat penting bagi

karena dengan demikian hal ini akan menghasilkan sesuatu hasil yang lebih akurat yang pada akhirnya akan berdampak besar pada organisasi.

2. Desa

Desa dibentuk berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, maka susunan masyarakat desa sangat terkait dengan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah lama berasal dari desa atau wilayah tersebut. Dimana hal ini berkembang dengan sendirinya bersama perkembangan masyarakat sesuai dengan kepribadian masyarakat yang bersangkutan.

1. Pengertian Desa

Desa menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian di atas suatu bentuk desa dimana terdapat masyarakat dengan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri dengan didasarkan keadaan setempat.

Undang-undang No.32 tahun 2004 tidak secara tersurat menyatakan desa mempunyai otonomi, tetapi dalam pasal-pasal mengenai desa disebut jelas hal-hal yang menunjang otonomi, antara lain:

- a. Dalam definisi dikatakan *kewenangan untuk mengatur dan mengurus*

- b. Hak pemerintahan desa untuk *membuat peraturan desa* .Hak membuat peraturan desa adalah juga bagian dari otonomi.
- c. Kepala desa bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa. Memimpin dan membina mengandung pengertian yang memperkuat mengatur dan mengurus sehingga tugas dan kewajiban kepala desa lebih jelas dari otonomi.

Pelaksanaan otonomi tidaklah mudah dan juga tidak murah. Hak dan kewenangan selalu terkait dengan kewajiban dan otonomi bukanlah kekuasaan tanpa batas. Mempunyai otonomi berarti mempunyai tanggung jawab. Dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 206, Kewenangan Desa mencakup:

- Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa,
- Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,
- Tugas pembantuan dari Pemerintah , Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota,
- Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Menurut I Nyoman Beratha, pengertian desa adalah :

“Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai pemerintahan sebagai bagian dari kecamatan.”⁸

Berdasarkan pengertian di atas, desa merupakan bentuk sekumpulan orang yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga orang merupakan salah satu unsur pembentuk dari desa. Adapun unsur-unsur desa adalah :

a. Wilayah

Wilayah merupakan suatu letak geografi suatu desa yang dalam hal ini desa mempunyai kewenangan atas daerah dalam garis batas tersebut, jadi wilayah merupakan suatu letak geografi dimana terdapat pemerintah desa yang memiliki kewenangan tertentu atas batas wilayah tersebut.

b. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dan mempunyai hubungan secara sah menurut aturan yang ada, Kepmen Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pasal 6 ayat (2) Jumlah penduduk dalam sebuah desa minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga.

c. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertugas dalam pelaksanaan pemerintahan desa bersama Badan Perwakilan Desa.

2. Administrasi Desa

Di dalam sebuah desa harus ada penataan dalam pengurusan rumah tangga

1. Untuk desa yang sudah mempunyai desa yang terlewat untuk itu diperlukan suatu

Adapun pengertian tentang Administrasi Desa tersebut adalah :

“Adminitrasi Desa adalah segala kegiatan kelompok orang berkerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama.”⁹

“Administrasi desa merupakan semua kagiatan yang bersumber pada wewenang pemerintah desa yang terdiri atas tugas-tugas, kewajiban dan hubungan kerja yang dilaksanakan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan Pemerintahan Desa”¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas maka dalam menjalankan Administrasi Desa diperlukan adanya pelaku-pelaku administrasi. Pelaku administrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuatu ketentuan dalam mendukung jalannya Pemerintahan Desa. Untuk mengembangkan administrasi tersebut maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pelaku administrasi itu sendiri. Hal tersebut digunakan didalam melakukan kegiatan Administrasi Desa.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu hal ini sangat penting, sehingga diperlukan suatu perencanaan yang matang dalam pembangunan.

Menurut Drs. Soenarjono.DW Pembangunan Masyarakat Desa adalah :

“Seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan desa”¹¹

⁹ Sofwan Budri, *Konsep-konsep Dasar Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan*, PT Bina Aksara, Jakarta.1983.hal 9

¹⁰ Sumber Sapirin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa*, Aksara Baru, Jakarta,1997.hal 48

Berdasarkan pengertian di atas pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki desa.

Menurut Drs. Suwignjo Manajemen Pembangunan Desa adalah :

“Segala kegiatan yang ditujukan untuk membuat usaha pembangunan di desa dapat berlangsung dengan baik, efisien dan efektif dalam kerangka kebijakan nasional dan dengan menggunakan sarana-sarana yang diarahkan dan ditetapkan oleh satuan pemerintahan yang lebih tinggi.”¹²

Dalam pengertian di atas bahwa segala usaha pembangunan desa didasarkan atas perencanaan pembangunan nasional, hal ini disebabkan karena pembangunan desa merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional.

Dalam pembangunan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam melakukan pembangunan desa, kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

1. Perencanaan

Yaitu menyangkut apa yang harus dikerjakan dalam mencapai tujuan pembangunan desa, dan siapa yang mengerjakannya. Dengan menggunakan sumber daya yang ada.

2. Pelaksanaan

Yaitu kegiatan yang harus dilaksanakan, yang sebelumnya telah dirumuskan dalam perencanaan pembangunan

3. Pengendalian dan Pengawasan

Yaitu mengadakan monitor, menilai apa dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan atas asal-usul dan kondisi sosial masyarakat setempat. Sehingga akan membentuk bentuk Pemerintahan Desa yang berbeda-beda sesuai latar belakang Pemerintahan Desa yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud pemerintahan desa adalah terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Didasarkan pengertian desa menurut Undang-undang tersebut maka jelas bahwa ini merupakan dasar menuju *Self Governing Community*, yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

1. Pemerintah Desa

Yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon-calon yang sesuai ketentuan. Kepala Desa sebagai alat Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan di desa.

Perangkat desa sebagai bagian dari Pemerintah Desa menurut Kepmen Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pasal 8 ayat 2 terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur wilayah. Dan lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Unsur Staf

Yang dimaksud Unsur Staf adalah unsur pelayanan seperti

Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha

b. Unsur pelaksana

Unsur Pelaksana yaitu unsur pelaksana teknis lapangan yang terdiri dari bagian-bagian yang secara teknis dikepalai oleh Kabag (Kepala Bagian) yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- 1) Bagian Pemerintahan
- 2) Bagian Pembangunan
- 3) Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat
- 4) Bagian Keuangan
- 5) Bagian Umum

c. Unsur wilayah

Unsur wilayah yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun, yang jumlahnya dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut UU No. 32 / 2004 anggota Badan Permusyawaratan Desa ini adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dimana sebelumnya fungsi yang serupa dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang diatur dalam UU No. 22/1999 tentang

pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi, kekuatan yang berpengaruh terhadap implementasi ini berasal dari kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dari pengaruh tersebut selain menghasilkan dampak yang diharapkan sering kali juga menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

Dalam implementasi dikenal berbagai model implementasi yang dikembangkan oleh beberapa ahli, model-model tersebut adalah sebagai berikut :

1. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

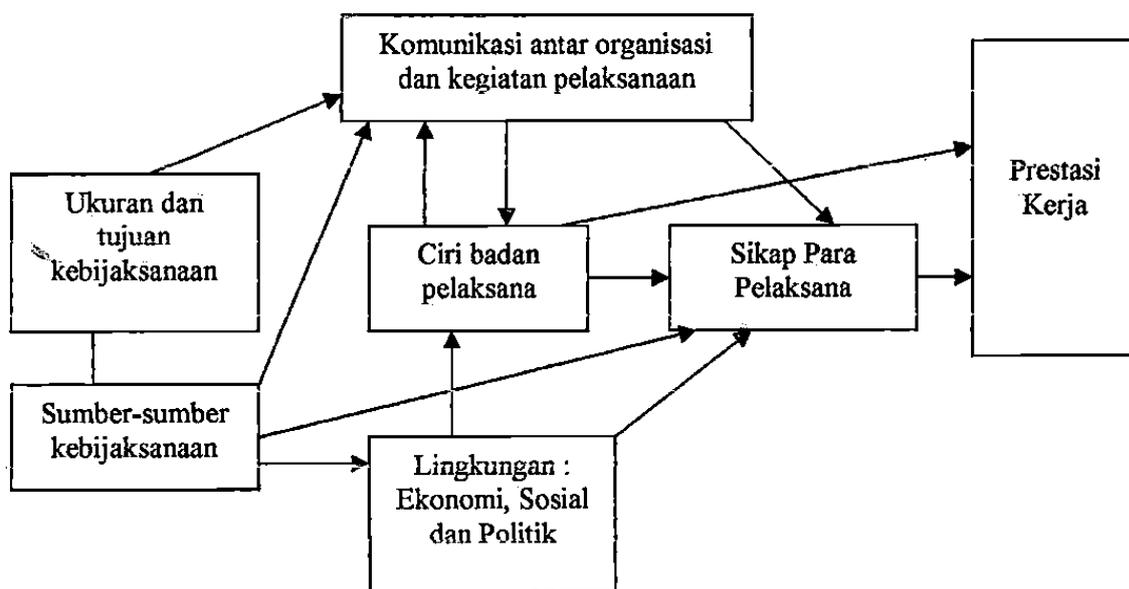
Model yang dikembangkan disebut *A Model of the Policy Implementation Process* (model proses implementasi kebijaksanaan). Dalam teori tersebut menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja. Hubungan tersebut menyangkut tentang hambatan yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, seberapa jauh efektivitas mekanisme kontrol dalam setiap struktur dan seberapa pentingkah rasa terikatan individu dalam organisasi. Hal juga dikemukakan oleh kedua ahli ini bahwa yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, variabel bebas tersebut adalah :¹⁵

1. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan.
2. Sumber-sumber Kebijaksanaan.
3. Ciri-ciri atau sifat Badan atau instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

5. Sikap para Perilaku

6. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik.

Untuk lebih jelas melihat hubungan isu kebijakan dan implementasi tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 yang menggambarkan proses implementasi kebijakan dengan berbagai variabel yang mempengaruhi implementasi.



Gambar 1.1 Model Proses Implementasi Kebijakan

Sumber : Solihin Abdul Wahab, Dr. MA. *Analisis Kebijakan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 1997 hal 80

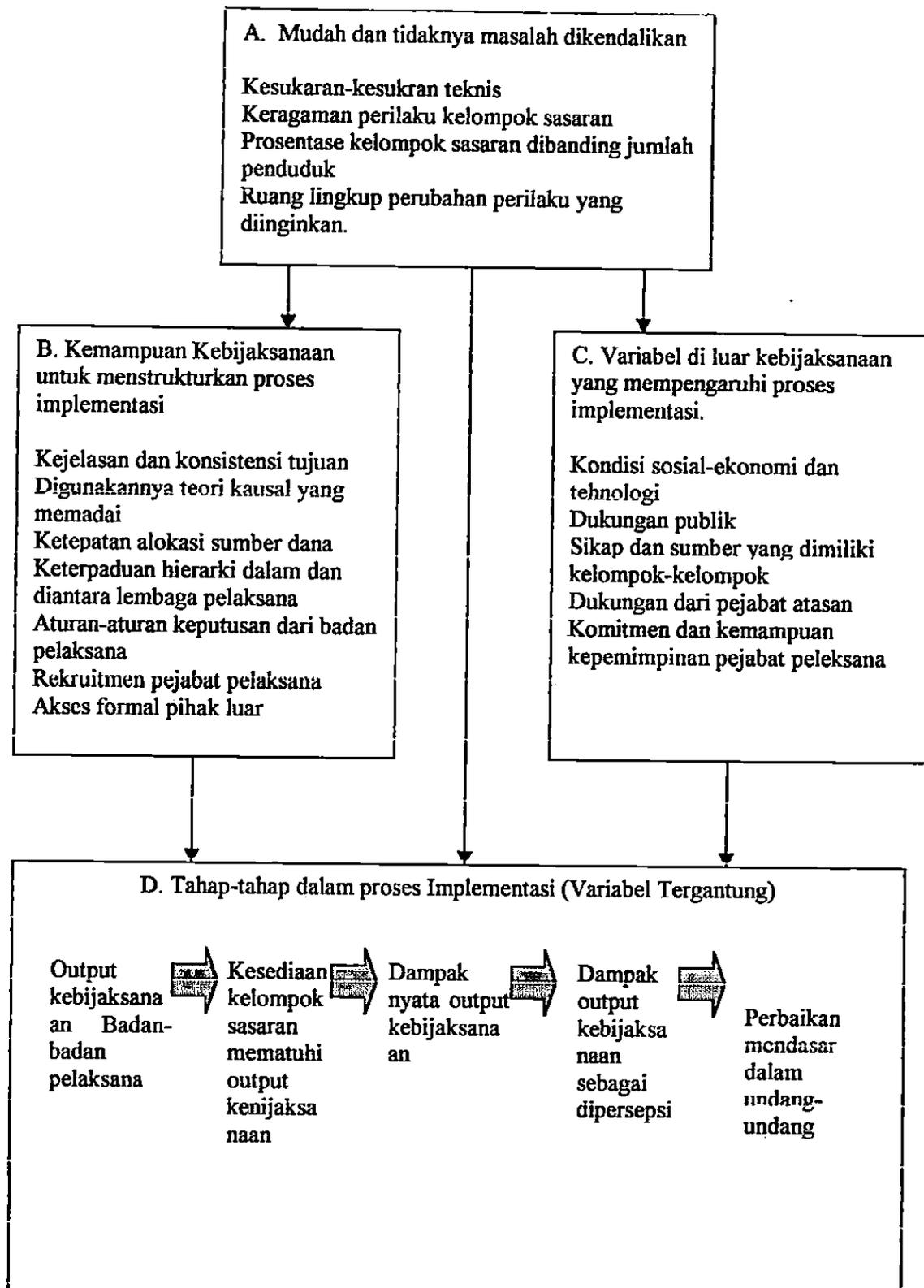
2. Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.

Model ini disebut *A Frame Work for Implementation Analysis* (Kerangka Analisis Implementasi). Mereka mengemukakan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada

keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yaitu :¹⁶

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 1.2, pada gambar tersebut ketiga kategori variabel di atas disebut variabel bebas (*independent variabel*), dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui disebut variabel



Gambar 1.2 Variabel-variabel Proses Implementasi Kebijakan

Sumber : Solihin Abdul Wahab, Dr. MA. *Analisis Kebijakan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* PT Bumi Aksara Jakarta 1997 hal 92

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini, Implementasi Rencana Strategis Desa Pendowoharjo tahun 2001-2004 dilakukan oleh Pemerintahan Desa Pednowoharjo. Hal tersebut dilakukan dengan mengadakan berbagai program dan kegiatan yang didasarkan rumusan Rencana Strategis yang telah disusun oleh Pemerintah Desa.

Perumusan Rencana Strategis Desa Pedowoharjo dapat dilihat dari :

1. Perumusan Visi dan Misi
2. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
3. Analisis faktor internal dan eksternal dalam perumusan Rencana Strategis,

yang dapat dilihat dari :

- a. Kekuatan (*Strength*)
- b. Kelemahan (*Weakness*)
- c. Peluang (*Opportunity*)
- d. Ancaman (*Threatment*)

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam implementasi Rencana Strategis tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

1. Kualitas dari badan pelaksana , dapat dilihat dari :
 - a. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
 - b. Adanya penertiban baik secara instansional maupun koordinasi.
 - c. Adanya sistem pengawasan baik antar instansi maupun dalam satu

2. Fungsi organisasi atau badan pelaksana, yang dilihat dari :
 - a. Desain struktur dan operasional organisasi
 - b. Adanya mekanisme pembagian tugas yang efisien
 - c. Adanya evaluasi hasil dari implementasi program telah dilaksanakan

4. Proses evaluasi implementasi, yang dapat dilihat dari :
 - a. Peran aktif lembaga kontrol pemerintahan desa
 - b. Perumusan dan pelaksanaan Rencana Program Tahunan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif . Metode penelitian deskriptif ini merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran , ataupun suatu kelas pada masa sekarang²⁰.

Adapun metode penelitian deskriptif ini ciri-cirinya sebagai berikut :²¹

1. Merupakan metode untuk membuat gambaran mengenai situasi, kejadian dan peristiwa sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data belaka dan survey.
2. Memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menerangkan hubungan-hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta

²⁰ Winarno Surahmat. *Dasar-Dasar Research*. Tarsito, Bandung, 1979. hal 126

menciptakan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

3. Mengumpulkan data dengan wawancara, menggunakan *schedule*, dan *interview guide*.

Dalam penelitian kualitatif ini, pada penyusunan desain penelitian secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.²² Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Apa yang telah dituliskan dan disajikan di bawah ini digunakan sebagai pegangan dasar untuk melaksanakan penelitian

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan untuk menganalisa data penyusun mempergunakan teknik analisa kualitatif. Dimana sifat dari bentuk penelitian kualitatif ini adalah menuturkan dan menaksirkan data yang ada, misalnya : tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak, tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, serta pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas maka penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan dengan angka-angka dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif melibatkan diri pada pengukuran-

²² D. J. dan I. Malena, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

menciptakan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

3. Mengumpulkan data dengan wawancara, menggunakan *schedule*, dan *interview guide*.

Dalam penelitian kualitatif ini, pada penyusunan desain penelitian secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.²² Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Apa yang telah dituliskan dan disajikan di bawah ini digunakan sebagai pegangan dasar untuk melaksanakan penelitian

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan untuk menganalisa data penyusun mempergunakan teknik analisa kualitatif. Dimana sifat dari bentuk penelitian kualitatif ini adalah menuturkan dan menaksirkan data yang ada, misalnya : tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak, tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang sedang nampak, serta pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan di atas maka penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan dengan angka-angka dalam menganalisis data. Penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif melibatkan diri pada pengukuran-

pengukuran pada tingkat tertentu, dan melibatkan diri pada perhitungan dengan angka-angka dalam menganalisa.

2. Unit Analisa Data dan Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok pembahasan masalah dalam penelitian ini maka akan ditentukan unit analisa data pada saat penelitian. Unit analisa ini didasarkan kepada pihak yang terkait dan yang relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber data yang diperlukan dalam mencari data yang diperlukan dalam penelitian, dalam penelitian yang dijadiakan unit analisa adalah Pemerintah Desa Pendowoharjo. Sedangkan yang akan dijadikan sumber data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pendowoharjo
2. Sekretaris Desa Pendowoharjo
3. Kepala Bagian
4. Ketua/ Wakil Ketua serta anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)
5. Perangkat Desa yang terkait
6. Tokoh-tokoh Masyarakat terkait

Penetapan sumber data penelitian di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam jalannya pemerintah desa dan dengan terkait dengan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Startegis Desa Pendowoharjo

Unit analisa informasi yang diperlukan dalam penelitian

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

a). Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan oleh penulis adalah jenis data primer dan sekunder, yang dapat diruraikan sebagai berikut :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten atau terkait secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, Pihak yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, dan Perangkat Desa terkait.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, dokumen dan laporan yang diperoleh desa Pendowoharjo.

b). Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam penelitian adalah :

a. Observasi

Observasi adalah usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar.²³ Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti yaitu Kantor Dinas Desa Pendowoharjo dengan maksud untuk mendapatkan data berdasarkan pengamatan dan mencatat yang bisa dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai sumber data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian ini. Untuk melakukan wawancara yang baik maka akan digunakan Panduan Wawancara atau *interview Guide*. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah Aparat terkait dalam lingkup pemerintahan desa Pendowoharjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴ Dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data (dokumen) yang sangat menunjang keakuratan penelitian ini, misalnya : Peraturan daerah, Surat Keputusan, Program Kerja, Perencanaan Pembangunan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

d. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data sekunder yang menunjang untuk penelitian ini, yaitu dengan cara mempelajari, mencatat, mengutip serta mengklasifikasikan dan menganalisis literature-literatur yang berhubungan dengan upaya implementasi rencana strategis, terutama yang berhubungan dengan upaya Implementasi Rencana Strategis Desa Bendowoharjo pada tahun 2001

4. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yang menggunakan analisis data secara induktif berarti bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian diadakan²⁵.

Lebih lanjut, analisis ini lebih merupakan pembentukan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan.

Dalam hal ini, penulis juga menggunakan teknik analisis Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu agar data yang diperoleh lebih sempurna²⁶.

Secara singkat proses analisa data, dimulai dengan penelaahan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Langkah berikutnya yaitu mengadakan redaksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi yaitu membuat rekaman proses inti permasalahan dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya ke dalam satuan-satuan (*Unityzing*), kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan (*Categorize*). Tahap akhir analisa data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap tersebut barulah dimulai tahap penafsiran data.

²⁵ Dr. Lexi J.Moloeng. Op-cit hal.6

²⁶ Dr. Lexi J.Moloeng. Op-cit.hal.178

5. Implementasi Rencana Strategis

Dalam suatu perencanaan yang dirumuskan terdapat berbagai langkah-langkah untuk mengimplementasikan dan menganalisa dampak serta kemungkinan yang akan dihadapi pada waktu pelaksanaan. Akan tetapi banyak sekali perencanaan yang didasarkan pada ide-ide yang kelihatan layak untuk dilaksanakan tetapi ternyata menemui kesulitan ketika harus diimplementasikan di lapangan.

Target dan strategi dalam pencapaian tujuan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang dapat mendukung tercapainya tujuan perencanaan tersebut. Dalam lembaga implementasi yang selalu melakukan diskresi atau keleluasaan dalam mengimplementasikan suatu bentuk perencanaan, dimana hal tersebut dikarenakan kondisi politik, sosial dan ekonomi masyarakat yang sering kali berbenturan atau menghambat dalam implementasi. Sehingga suatu perencanaan yang dilaksanakan sering kali banyak menimbulkan pemudaran, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan kebijakan.

Rencana Strategis dilaksanakan dengan membangun strategi yang digunakan sebagai pembangun implementasi yang akan dicapai. Dalam strategi harus mencakup alokasi berbagai sumber daya yang mendukung serta sistem kontrol dan pengawasan. Seperti yang dikemukakan oleh John M Bryson strategi harus diuraikan dengan cukup rinci agar memungkinkan adanya penilaian yang akurat oleh eksekutif tentang kemampuannya dan memberikan panduan yang layak bagi

Dalam mencapai keberhasilan implementasi Renstra tidak terlepas dari penggunaan sarana-sarana terpilih, karena itu pemilihan sarana-sarana sebagai penunjang pelaksanaan program dalam mencapai tujuan dan maksud yang telah ditetapkan harus dilakukan secara hati-hati. Dalam suatu implementasi harus diperhatikan faktor-faktor yang memungkinkan tujuan dan maksud pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dicapai. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :¹⁸

1. Komunikasi

Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga komunikasi bagi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan.

2. Sumber daya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksanaannya.

3. Sikap pelaksana

Sikap pelaksanaannya yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lencarnya suatu program.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi Konsepsional adalah generalisasi dari sekelompok fenomena, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Konsep ini merupakan penelitian yang penting serta merupakan definisi untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena sosial maupun alami¹⁹.

Konsep-konsep yang dapat digunakan untuk memperjelas konseptual dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis adalah berbagai upaya untuk membuat keputusan dan tindakan penting untuk mencapai tujuan (goal) dari organisasi dan untuk membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi., apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan berada dibatas wilayah tertentu.
3. Pemerintahan Desa adalah bentuk dari organisasi yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan di tingkat desa untuk mencapai tujuan berdasarkan pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa terbentuk dari :
 - a. Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)